

OMBUDSMAN RI: TATA KELOLA ENERGI MASUK DALAM DIMENSI PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 24 Juni 2021 - Anita Widyaning Putri

Balikpapan - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menegaskan bahwa tata kelola energi masuk ke dalam dimensi pelayanan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema "Membangun Tata Kelola Energi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pelayanan Publik" di Novotel Balikpapan pada Rabu (23/06/2021).

"Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga Ombudsman perlu melakukan pengawasan," ucapnya.

Hery memaparkan bahwa Ombudsman memiliki tiga peran dalam tata kelola energi, "Pertama dengan menindaklanjuti laporan masyarakat pada sektor energi, kedua melakukan pemeriksaan inisiatif dan ketiga dengan melakukan pencegahan maladministrasi dalam sektor energi."

Saat ini Ombudsman tengah mengkaji adanya isu-isu maladministrasi dalam tata kelola energi salah satu yang menjadi sorotan adalah dalam pengelolaan kilang minyak Balongan Indramayu dan Cilacap. "Ini sedang dibahas oleh Ombudsman jangan sampai ada praktik-praktik maladministrasi," ujar Hery.

Hery mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik dalam sektor energi melalui Respons Cepat Ombudsman (RCO).

"Kita juga menerima laporan melalui WhatsApp sebagai langkah cepat, kami merespons informasi tersebut dan tentunya akan kami klarifikasi kebenarannya,"ujarnya.

Sehingga diharapkan melalui laporan dari masyarakat tersebut dapat meningkatkan koordinasi antara Ombudsman RI dengan instansi penyelenggara publik khususnya dalam sektor energi.

Turut hadir dalam diskusi publik Kepala Perwakilan Kalimantan Timur Kusharyanto, S.H., M.A, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Isradi Zainal, MT., NH., M.M. dan Perwakilan PT Pertamina Kurniawan.